



Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

**PERAN PEREMPUAN NU DALAM PEMBANGUNAN
DESA UNTUK INDONESIA YANG BERKEADABAN**

Oleh
H. MARWAN JAFAR
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

Disampaikan dalam :
Tasyakuran Harlah Fatayat NU ke 65 dan Launching Kongres Fatayat NU XV
Jakarta, Jumat 24 April 2015

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrohim

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karuniaNya lah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk mensukseskan acara ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta ummatnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya pada acara Tasyakuran Harlah Fatayat NU ke 65 dan Launching Kongres Fatayat NU XV, saya akan menyampaikan Sambutan dengan judul “PERAN PEREMPUAN NU DALAM PEMBANGUNAN DESA UNTUK INDONESIA YANG BERKEADABAN”.

Para Peserta yang berbahagia,

Indonesia yang berkeadaban merupakan cita-cita mulia bangsa yang harus terus kita perjuangkan. Salah satu langkah penting untuk mewujudkan cita-cita mulia ini adalah dari mewujudkan desa Indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera. Karena desa adalah sisi wajah Indonesia yang sampai sekarang ini tidak seluruhnya cantik berseri, tetapi sebagian besar masih bopeng akibat kurang perhatian dan perawatan.

Dari seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya 74.093 desa, saat ini masih ada 39.086 desa (52,78 persen) yang masuk kategori desa tertinggal, sebanyak 17.268 desa (24,48 persen) ddiantaranya akan merupakan desa sangat tertinggal, dengan 1.138 desa berada di wilayah perbatasan. Data BPS menyebutkan masih ada 10.985 desa yang belum memiliki Sekolah Dasar (SD). Sementara untuk pelayanan kesehatan dasar, masih ada 117 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas atau Puskesmas Pembantu. Kondisi desa dan kawasan perdesaan yang masih memprihatinkan inilah kiranya yang perlu menjadi perhatian kita semua, perlu dukungan dan peranserta kita semua untuk mengentaskannya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemban misi Pembangunan Desa untuk membangun desa menjadi lebih maju, berkembang ekonominya secara mandiri, masyarakatnya lebih sejahtera. Sesuai amanat UU Desa 6/2014 dan Nawa Cita ketiga "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Para Peserta yang berbahagia,

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini setiap desa akan menerima bantuan dana desa rata-rata Rp 750 juta per desa, yang akan dikucurkan secara bertahap dimulai bulan April ini setelah desa memenuhi persyaratan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Dana desa merupakan amanah yang harus dikelola secara amanah agar bisa memajukan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan sosial desa, menciptakan peluang kerja dan usaha dengan penghasilan layak bagi warga desa, mengatasi pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menambah pemasukan kas desa dan pendapatan asli daerah.

Dana desa diharapkan bisa dimanfaatkan untuk membentuk atau mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai suatu lembaga usaha desa yang akan mengelola dan mengembangkan berbagai usaha desa dan masyarakat secara profesional. Melalui Bumdesa ini desa bisa menarik investasi dan menjalin kerjasama usaha dengan pihak lain khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat desa.

Pembangunan desa juga dipercepat melalui Program Transmigrasi yang mengisi dan menjadikan wilayah kosong atau minim penduduk menjadi unit permukiman yang kemudian berkembang menjadi desa-desa yang maju pertaniannya dan terintegrasi dengan desa-desa sekitarnya sehingga membentuk kawasan perdesaan yang menjadi sentra-sentra produksi di bidang pangan. Dengan aktifitas perekonomian di bidang industri, perdagangan dan jasa yang terus meningkat, kawasan perdesaan akan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan mendukung kemajuan perekonomian daerah dan nasional.

Para Peserta yang berbahagia,

Kerja mulia membangun desa dan desa membangun untuk Indonesia yang sejahtera ini tidak mungkin dilakukan sendirian oleh Pemerintah. Dibutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat, termasuk Perempuan Nahdlatul Ulama. Dalam konteks NU, partisipasi dalam Pembangunan Desa mengandung tanggung jawab sosial yang sangat besar karena warga NU mayoritas tinggal di perdesaan, dan secara sosial ekonomi masih sangat membutuhkan pemberdayaan.

Hadirnya program Pembangunan Desa yang akan dikelola dan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa, merupakan peluang yang harus

dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga NU untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya bersama dengan warga desa lainnya.

Peluang Perempuan NU terlibat aktif dalam Pembangunan Desa sangat terbuka lebar, baik di dalam struktur Pemerintahan Desa maupun di luar. Lebih-lebih banyak Perempuan NU yang memiliki posisi dan peran penting di tengah masyarakat desa, baik sebagai Pengasuh Pesantren, Ustadzah, Muballighah, Pimpinan Ormas dan OKP, dan tokoh masyarakat.

Peran nyata yang dapat dilakukan oleh Perempuan NU dalam Pembangunan Desa diantaranya:

1. Memberikan landasan keagamaan bahwa Pembangunan Desa adalah suatu ibadah jika niatnya untuk kebaikan dunia dan akhirat.
2. Mengajak masyarakat untuk mendukung dan ikutserta dalam pembangunan desa, melalui berbagai forum keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan sebagainya.
3. Menjadi Perangkat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, atau aktif dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui proses rekrutmen oleh Desa.
4. Menjadi tenaga pendamping desa melalui proses rekrutmen terbuka yang diselenggarakan Pemerintah.
5. Berperan aktif dalam Musyawarah Desa khususnya dalam perumusan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
6. Berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDesa.
7. Membangun sinergi dengan elemen masyarakat desa lainnya dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Demikianlah sambutan yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi amal shalih kita semua.

Wallohul Muwafiiq ilaa aqwamith thorieq.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

H. Marwan Jafar